



INDONESIA PASCA-KONFLIK: KEKERASAN SOSIAL, PERDAMAIAN, DAN WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Muliono

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
muliono191@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses post-conflict society in Indonesia and the discourse on sustainable peace building and development. Post-conflict studies are important to be discussed not only for the recovery purposes, but also to deeply understand the potential of continued violent conflict in the new forms which have impact on psychological, economic and socio-political instability. This article shows that the challenges of peace building in the post-conflict period in Indonesia are based on three main problems. First, the history of past conflict experiences especially in the areas with the history of large-scale conflicts. Second, the pluralistic characters of Indonesia in the terms of ethnicity, religion, race and class. Third, the new character of violent conflict based on the electoral democratic process. The practice of electoral democracy in Indonesia tends to arouse the desire of violent conflict especially when it touches the political identity issues. Therefore, building the post-conflict society requires preventive approach and peace consolidation (conflict transformation) through a sustainable empowerment and development agenda. This agenda must involve empowerment paradigm through institutional development to organize various aspirations and public needs at the local level, as well as institutional development that is oriented in capacity building and community empowerment through democratized and decentralized process.

Keywords: Post-Conflict Society, Social Violence, Sustainable Peace Building and Development

ABSTRAK

Studi ini mendiskusikan masyarakat pasca-konflik di Indonesia dan wacana pembangunan perdamaian berkelanjutan sebagai jalan membangun masyarakat pasca-konflik. Studi pasca-konflik penting didedah bukan saja untuk kepentingan pemulihan atas dampak konflik kekerasan yang ditimbulkan tetapi juga adanya kecenderungan potensi konflik kekerasan lanjutan dalam bentuk baru berdampak pada instabilitas psikologis dan ekonomi-sosio-politik. Studi ini menunjukkan tantangan pembangunan perdamaian di Indonesia pada masa pasca-konflik didasarkan kepada tiga hal utama yaitu sejarah masa lalu terutama di daerah memiliki riwayat konflik berskala besar; karakter Indonesia yang plural dari segi suku, agama, ras dan golongan; dan, karakter baru konflik kekerasan yang dilatari oleh proses demokrasi elektoral. Praktik demokrasi elektoral cenderung membangkitkan gairah konflik kekerasan khususnya ketika isu yang digunakan menyentuh masalah politik identitas. Untuk itu, membangun masyarakat pasca-konflik membutuhkan pendekatan preventif dan konsolidasi perdamaian (conflict transformation) melalui agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development and empowerment). Agenda ini harus melibatkan paradigma pemberdayaan via pengembangan kelembagaan bersifat fungsional untuk mengorganisasi berbagai kebutuhan dan aspirasi publik pada aras lokal, serta

pengembangan kelembagaan yang diorientasikan kepada penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat melalui proses demokratisasi dan desentralisasi.

Kata Kunci: Masyarakat Pasca-Konflik, Kekerasan Sosial, dan Pembangunan Perdamaian Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Indonesia selama beberapa dekade memiliki sejarah dan siklus konflik kekerasan yang cukup penting untuk diperhatikan. Konflik kekerasan terjadi hampir di seluruh daerah dan mengakibatkan dampak yang besar baik pada kerusakan fisik maupun korban jiwa. Ada dua varian pusran konflik di Indonesia yaitu konflik vertikal dan horisontal. Secara vertikal kekerasan terjadi antara masyarakat sipil versa rezim penguasa. Sementara secara horisontal, dinamika konflik dan kekerasan sosial melibatkan berbagai lapisan masyarakat antar golongan, suku, ras, dan agama.

Varian konflik kekerasan ini ironisnya terjadi secara gradual. Pada masa orde baru kekerasan sosial bercorak rakyat versa rezim penguasa (negara). Setelah itu, diikuti pada masa transisi transformasi ke demokrasi konflik kekerasan mengalami pergeseran wajah dan berkarakter komunalitas suku, agama, ras, dan antar-golongan. Dua varian praktik kekerasan sosial ini sama memberi dampak cukup besar dalam pengalaman hidup dan ingatan kolektif masyarakat baik itu pada hubungannya antara sesama masyarakat maupun antara masyarakat sipil dan negara.

Secara perlahan Indonesia telah melakukan berbagai bentuk resolusi atas dentaman konflik yang terjadi (Ali dan Panggabean, 2009; McLaughing dan Perdana, 2010; Arjon, 2018). Dan, saat ini Indonesia dikategorikan berada dalam masa pasca-konflik (Lambang, 2001; MSR, 2009; Ansori, et al., 2015;). Pasca-konflik (*post-conflict*) dimaknai sebagai situasi dimana pihak yang terlibat konflik

dan kekerasan menghentikan pertikaian atau permusuhan secara resmi, melalui proses negosiasi tertentu, dan diikuti adanya perjanjian damai yang menandai kemungkinan berakhirnya konflik (Brown, 2011).

Pendefenisian ini menjadi tidak sederhana ketika ditemukan fakta sosiologis yang mewartakan bahwa dicapainya kesepakatan perdamaian tidak serta-merta konflik tersebut benar-benar berakhir. Selalu ada sisa luka masa lalu yang belum berlalu. Bahkan pertikaian dan kekerasan rentan berlanjut kembali secara sporadis. Belajar dari Sri Lanka (Meghan, et al 2001), Irlandia Utara (Brown, 2011), dan beberapa negara lain (Mroß dan Fiedler, 2016) menguatkan argumen bahwa masyarakat pasca-konflik memiliki tingkat kerentanan terjerat kembali kepada konflik kekerasan lanjutan.

Demikian Indonesia, Indonesia masih menghadapi tantangan pembangunan perdamaian yang sama hingga sampai saat ini. Tantangan tersebut setidaknya didasarkan kepada tiga hal yaitu historis masa lalu terutama di daerah-daerah konflik berskala besar, karakter Indonesia yang plural dari segi suku, agama, ras dan golongan (Bertrand, 2004; Klinken, 2007; Jubba, 2019), dan praktik demokrasi elektoral (SNPK, 2005-2013; Ansori, 2015) yang dapat saja sewaktu-waktu membangkitkan gairah kekerasan akibat keberlangsungan kontestasi, khususnya ketika isu yang digunakan menyentuh isu politik identitas. Untuk itu, membangun masyarakat pasca-konflik sebagaimana ditekankan Lambang (2001) memerlukan pendek-

tan dan strategi yang bersifat khusus bukan saja untuk mencegah (*prevent*) tetapi juga mengkonsolidasikan perdamaian menuju tercapainya pembangunan dan perdamaian berkelanjutan.

MASYARAKAT PASCA-KONFLIK (*POST-CONFLICT SOCIETY*)

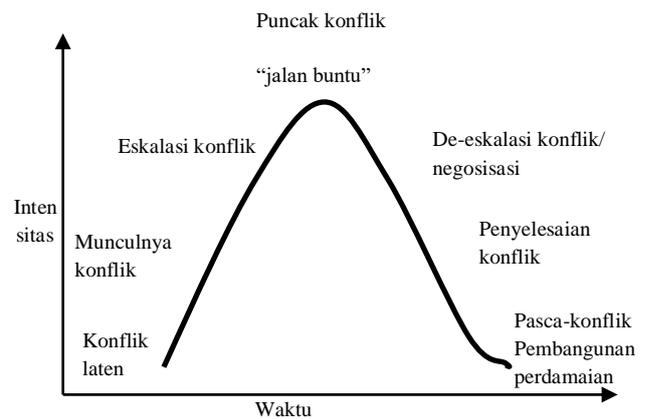
Masyarakat pasca-konflik ditandai dengan kondisi yang “labil” dan rentan terjerembab kembali kepada konflik kekerasan serupa. Kondisi ini secara global banyak dialami negara yang telah mengalami konflik kekerasan sebelumnya, khususnya oleh Brown et al (2011) adalah negara dengan masalah perekonomian (*the poorer and less developed*). Mereka berjuang untuk pulih dengan warisan kekerasan sosial masa lalu. Negara-negara mengalami kenyataan ini dapat dirujuk datanya kepada Mroß dan Fiedler (2016).

Masyarakat pasca-konflik masih dipandang sebagai yang rapuh (*easily fragile society*). Secara manifes di aras permukaan fenomena konflik mengalami pengurangan (deeskalasi). Namun secara laten dimungkinkan tetap menyisakan benih yang sewaktu-waktu dapat menemukan momentumnya untuk bererupsi. Sisi latensi konflik merupakan daya dorong kuat terhadap munculnya bentuk-bentuk kekerasan lain (Ericksson dan Wallenstein, 2004). Dan tentu, secara praksis kondisi ini menjadi penghambat dalam berbagai upaya kesepakatan perdamaian dan pembangunan (lihat Darby, 2001). Figur 1 adalah ilustrasi mengenai dinamika konflik dan kekerasan sosial.

Pada masa pasca-konflik, idealnya, masyarakat konflik tidak dilihat sebagai periode yang dibatasi oleh satu titik peristiwa capaian tertentu, tetapi sebagai proses yang melibatkan pencapaian berbagai tonggak perdamaian. Pencapaian tonggak perdamaian itu (lihat Brown et al., 2011) dapat berupa berhentinya berbagai bentuk permusuhan (*hostility and revenge*) dan aksi kekerasan (*vio-*

lence); adanya kesepakatan perdamaian; adanya proses demobilisasi, pelucutan senjata dan reintegrasi; pemulangan mereka yang menjadi pengungsi korban konflik kekerasan; terbentuk/ terbangunnya kelembagaan yang bersifat fungsional; mencapai rekonsiliasi dan integrasi masyarakat; dan serta pemulihan ekonomi (*economy recovery*).

Figur 1. Ilustrasi Dinamika Konflik dan Kekerasan Sosial



Gagasan masyarakat pascakonflik dalam studi ilmu sosial mendapat perhatian khusus untuk dikaji karena kehadiran fenomena kekerasan yang secara bersamaan mengaburkan perbedaan antara konflik kekerasan riil (berdasarkan isu dominan dimana konflik kekerasan sebelumnya terjadi), kekerasan dengan isunya yang baru, aksi premanisme, serta meningkatnya aksi kekerasan melibatkan orang-orang yang tidak bersalah (Hayner, 2010; Hynes, 2004). Tidak sampai di situ, masyarakat pasca-konflik juga memiliki dampak secara sosial seperti masalah disintegrasi, masalah ekonomi dan secara psikologis (Alexander et al., 2004) seperti trauma dan kesehatan mental lainnya.

Berkaitan dengan hal ini, ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan dalam masyarakat pasca-konflik. Tiga aspek tersebut ialah keadaan dan potensi ekonomi, sistem politik, kapasitas birokrasi (kelembagaan) dan sistem keamanan di masyarakat berkonflik. Setiap masyarakat pasca-konflik dapat

saja memiliki tingkat kebutuhan berbeda yang perlu mendapat perhatian khusus. Kebijakan pasca-konflik dalam relasinya terhadap tiga hal tersebut harus berorientasi untuk mewujudkan rekonstruksi, mendorong pemulihan berkelanjutan, dan mereduksi kemungkinan kembali terulangnya konflik dan kekerasan sosial baru.

KONFLIK DAN KEKERASAN SOSIAL DI INDONESIA

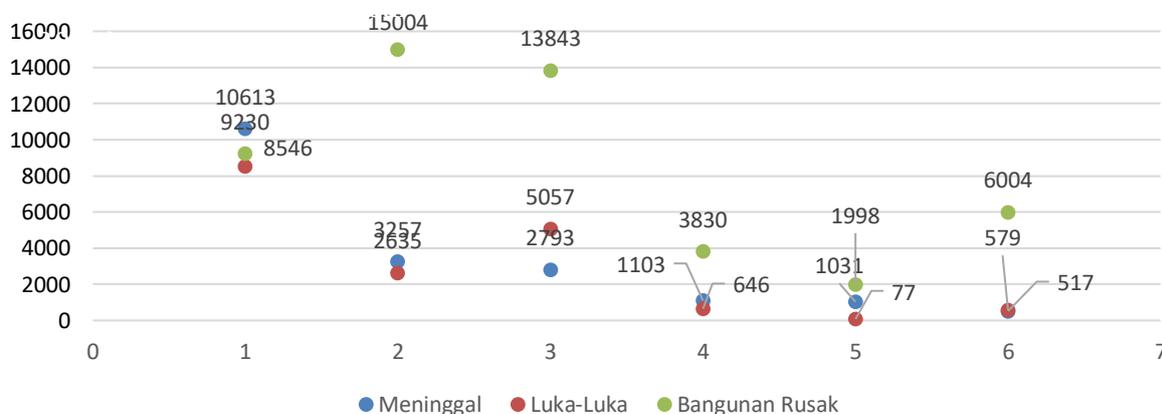
Konflik dan kekerasan sosial di Indonesia dapat dipetakan kepada tiga fase utama yaitu fase rezim Orde Baru, masa transisi awal (1997-2003), dan periode pasca reformasi (tahun 2004 hingga sekarang). Tiga periode ini memiliki pola konflik kekerasan yang berbeda dan mengalami perubahan seturut dengan perkembangan proses demokratisasi di Indonesia (Muliono, 2020).

Pada masa rezim Orde Baru konflik dan kekerasan sosial berkarakter penguasa (negara) versus masyarakat sipil. Sebagian tindakan represi dilakukan negara memperoleh resistensi sebagaimana terjadi di Papua (1964), Aceh (sejak tahun 1976) dan Timor Timur dengan melakukan gerakan separatis untuk melepaskan diri dari kesatuan republik Indone

sia. Gerakan separatis ini mengakibatkan dentaman konflik kekerasan dan diikuti korban dalam skala yang begitu besar (Barron et al., 2014). Belakangan, Timor Timur berhasil memisahkan diri (pada Mei 2002), Aceh memperoleh resolusi perdamaian tahun 2005 (Asia Report, 2007; Fahmi, 2014), sementara Papua masih terus menacari jalan perdamaian hingga sampai saat ini dan kerap jatuh bangun dalam pusaran konflik kekerasan.

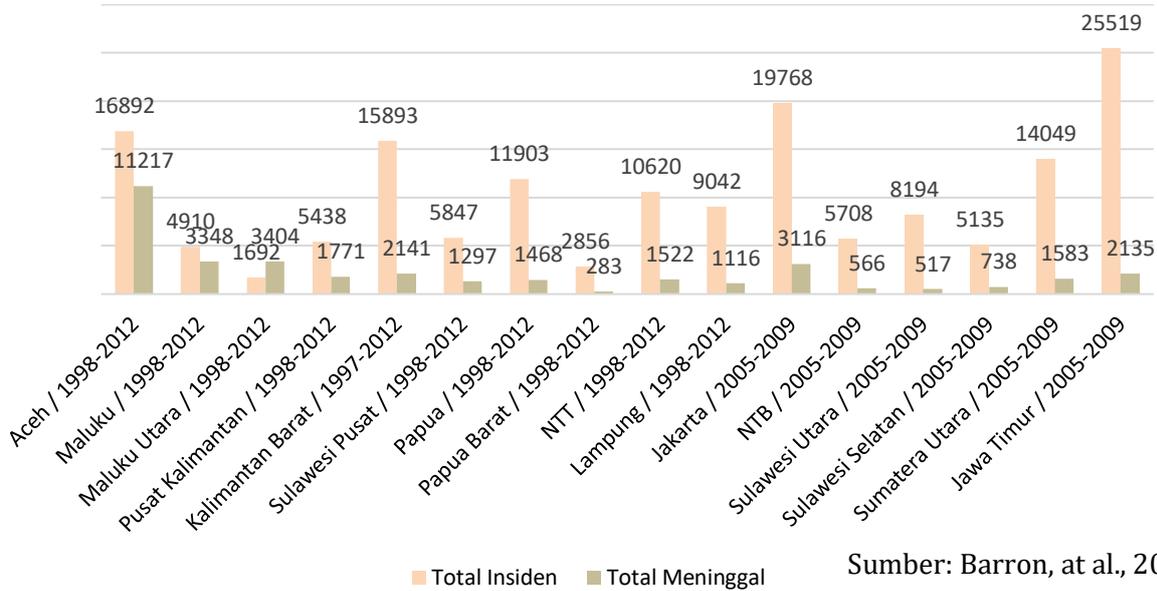
Pada masa transisi pasca runtuhnya rezim Orde Baru konflik dan kekerasan sosial di Indonesia berkarakter komunalitas dimana suku, agama, ras, dan antar golongan dipandang sebagai basis konflik kekerasan. Fase ini cukup menarik diperhatikan karena dalam rentang waktu lima tahun terdapat setidaknya 21.495 korban jiwa (Barron et al., 2014). Dan, di antara insiden tersebut, terdapat 6 (enam) provinsi dikategorikan sebagai daerah konflik berskala tinggi dan berkelanjutan yaitu Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Konflik Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat tahun 1998-2008 berdasarkan data World Bank (2010), sejak tahun 2006 rata-rata per tahun mengalami insiden 2.000 peristiwa konflik kekerasan.

Figur 2. Jumlah Total Dampak Kekerasan di Indonesia Pada Masa Transisi Awal



Sumberber: World Bank (2010), Barron et al., 2014) dan dimodifikasi penulis

Figur 3. Konflik dan Kekerasan Sosial 1998-2012 Berdasarkan 16 Provinsi Mengalami Insiden Konflik Kekerasan Berskala Tinggi dan Rendah



Di luar daerah tersebut konflik kekerasan berskala besar juga turut terjadi di beberapa daerah seperti di Jakarta (pertengahan Mei) pada masa peralihan kekuasaan mendahului jatuhnya rezim Orde Baru dan kerusuhan (*riot*) anti-Cina di kota Medan dan Solo (Purdey, 2006). Fakta ini menegaskan kendati konflik dan kekerasan sosial berskala tinggi pada masa transisi tersentral di beberapa daerah, dinamika kekerasan sosial berbasis komunal terjadi hampir di semua daerah (lihat figur 4).

Kondisi mencuatnya praktik kekerasan sosial menjadikan Indonesia sebagai negara beresiko mengalami perpecahan sebagaimana misalnya dialami Yugoslavia (1990-2001) dan atau di India (1947) (Emmerson, 2000; Aspinall & Berger, 2001). Konflik dan kekerasan sosial berbasis komunal di Yugoslavia dan India berdampak tidak saja mengakibatkan korban dalam jumlah yang sangat banyak tetapi juga mengalami keterbelahan sebagai negara. India terpecah menjadi Pakistan dan India (Mittal & Ranjan, 2016). Sementara Yugoslavia berujung genosida etnis besar-besaran. Bahkan disebut, kekerasan sosial Yugoslavia sebagai genosida terbesar setelah pe-

rang dunia kedua (Çinar, 2019). Beberapa bentuk konflik kekerasan sosial dan dampaknya di Indonesia pada masa transisi reformasi dapat dilihat pada figur 4 di bawah.

Figure 4. Bentuk Konflik Kekerasan dan Jumlah Korban Jiwa Masa Transisi Awal (1998-2003) Berdasarkan Delapan Provinsi¹

Isu Konflik Kekerasan	Jumlah
Komunal:	8703
1. Antar agama	6509
2. Antar etnis	2158
3. Lain-lain	36
Separatis	6997
Sumber Daya	106
Tata Kelola	
Pemerintahan	54
Pemilu	12
Main Hakim Sendiri	117
Kriminal	2959
Kekerasan Rumah	
Tangga	152
Penegakan Hukum	112
Tidak Jelas	64

Sumber Data: Barron et al., 2014

¹ Aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Kalimantan Barat.

Data sebagaimana disajikan memperlihatkan dua varian konflik kekerasan sosial berskala paling tinggi yaitu konflik komunal dan separatisme. Secara khusus konflik kekerasan berbasis komunal terbesar tersentral pada antar agama dan etnis. Fakta ini sekaligus menyiratkan kekhawatiran dan tantangan pluralisme di Indonesia khususnya ketika dihadapkan dengan politik identitas dan konservatisme. Mengingat Indonesia merupakan negara yang termuat dari berbagai etnis, suku, agama, maka kenyataan pluralitas suku, agama, ras, dan antar-golongan dapat menjadi dua jembatan: jembatan perpecahan dan jembatan untuk demokrasi dan pemberdayaan.

INDONESIA PASCA-KONFLIK

Situasi memprihatinkan pada periodisasi siklus konflik di Indonesia menjadi catatan penting dalam mempelajari masyarakat pasca-konflik seperti dinamika, potensi, dan keberlanjutan konflik baru. Secara umum masa pasca-konflik di Indonesia ditandai dengan meredanya berbagai konflik dan kekerasan sosial di berbagai daerah konflik (lihat figur 2). Daerah tersebut sebagian besar telah menemukan jalan resolusi dan proses pembangunan dan pemberdayaan ke arah demokrasi khususnya daerah dengan skala konflik yang tinggi (lihat figur 3).

Penemuan jalan resolusi tersebut membawa Indonesia kepada wajah baru dalam kehidupan sesama dan kehidupan bernegara. Wajah konflik di Indonesia seiring berjalannya proses pembangunan (pasca-konflik) berkarakter pada konflik proses demokrasi elektoral. Dan, pola penyaluran konflik juga cenderung telah bertransformasi ke cara-cara yang damai (*peaceful*) seperti aksi protes dan demonstrasi, kecuali daerah Papua.

Artinya, berakhirnya konflik berskala tinggi tidaklah berarti berbagai konflik dan kekerasan sosial di Indonesia turut berakhir secara totalitas (Muliono, 2020). Melainkan tetap berada dalam ambang gesekan demi gesekan. Dalam hal

tertentu gesekan itu mengakibatkan aksi kekerasan (lihat figur 3).

Kontestasi demokrasi elektoral membawa tantangan tersendiri. Praktik kontestasi masih belum menandai kedewasaan dan masih syarat dengan feodalisme serta politik dinasti sebagai wujud dari warisan kultur masa lalu yang belum berlalu. Setiap perayaan demokrasi (demokrasi elektoral-peralihan kekuasaan) Indonesia rentan mengalami guncangan bernuansa konflik kekerasan dan perpecahan. Guncangan ini diperparah dengan selalu berkembangnya narasi politik identitas berbasis SARA.

Merujuk kepada daerah mengalami konflik kekerasan masa lalu (lihat figur 2 dan 3), *national violence monitoring system dataset* (SNPK, 2015) merilis data mengenai peristiwa dan dampak kekerasan antara 2005 sampai dengan 2013. Data tersebut menarik dicermati, bahwa daerah-daerah dengan riwayat konflik masa lalu justru memiliki tingkat konflik lanjutan yang juga tinggi dibandingan daerah lain. Untuk kasus Aceh dan Maluku misalnya, Ansori, et al (2015), menggambarkan konflik kekerasan Aceh bercorak vertikal dan masih merupakan bagian integral dari perjanjian kesepakatan (MoU) "Perjanjian Helsinki 2005". Sementara Maluku bercorak horisontal dan lebih merupakan bagian integral dari implementasi kebijakan nasional mengenai desentralisasi dan friksi antara agama Islam dan Kristen. Gesekan dalam kontestasi pilkada pasca-konflik di Maluku lebih cenderung merupakan perpanjangan tangan yang kuat dari warisan konflik sebelumnya.

Gejolak konflik dan kekerasan dalam momen demokrasi elektoral (*peralihan kekuasaan*) pada skala makro menemui momentumnya rentang 2014-2019 khususnya berkaitan dengan kasus penistaan agama oleh gubernur DKI, Ahok. Gesekan ini secara dramatis menimbulkan ketegangan dan berdampak kepada munculnya masyarakat massa beridentitas keislaman. Beberapa isu

dominan rentang 2016-2020 adalah isu anti Cina, komunisme, konflik agraria, dan separatisme (Muliono, 2020). Tampak bahwa narasi yang menjadi basis isu memiliki kesamaan dengan masa dimana Indonesia berada dalam periode konflik kekerasan dimana isu identitas terasa sangat kentara.

Lebih lanjut, pada masa pasca-konflik kekerasan sosial di Indonesia melibatkan negara terhadap masyarakat sipil khususnya kalangan umat Islam yang secara politik termarginalkan. Pada tahun 2019 sebagaimana didedah YLBHI (2020) aparat kepolisian merupakan aktor pelaku kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia paling dominan dalam hubungannya untuk merespon berbagai aspirasi publik.

Pada dataran ini, apa yang menjadi catatan penting adalah konflik berskala rutin berbasis politik identitas. Jika eksistensi konflik tidak dapat dikelola secara konstruktif maka akan menjadi faktor pemicu eskalasi konflik berskala besar pada saat menemukan momentumnya. Tingginya tingkat kekerasan rutin dapat menjadi penanda akan adanya potensi eskalasi konflik yang jauh lebih besar.

MEMBANGUN PERDAMAIAN PASCA-KONFLIK

Wacana pembangunan perdamaian telah banyak mendapat perhatian secara global dan bahkan dijadikan sebagai salah satu kerangka agenda pembangunan (Galtung, 1990; Fiedler dan Mroß, 2017). Akan tetapi dalam kajian-kajian akademis wacana ini masih dikatakan sebagai yang relatif baru (Lambang, 2009). Pembangunan perdamaian masyarakat pasca-konflik dalam bagaimanapun memerlukan pendekatan-pendekatan preventif untuk dapat mencegah konflik agar tidak terulang kembali. Pencegahan konflik, dalam arti yang khusus, memiliki arti yang sama dengan pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping*) (Lambang, 2009).

Disamping itu, juga diperlukan pendekatan transformasi konflik melalui

proses pembangunan perdamaian. Transformasi konflik merupakan proses mengelola konflik dari yang bersifat destruktif (*violence conflict*) ke arah yang konstruktif (*peace conflict*) yaitu mentransformasi berbagai relasi, struktur sosial, dan kondisi yang dapat memicu timbulnya konflik dan kekerasan sosial. Dua pendekatan ini harus disinergikan dalam membangun perdamaian pada masyarakat pasca-konflik (Anan, 2002).

Dalam studi konflik, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dijadikan alat analisis dalam kepentingannya terhadap membangun perdamaian. Pendekatan itu seperti pendekatan “bawang merah”, garis waktu yang menceritakan perkembangan eskalasi konflik, dan segitiga konflik. Pendekatan “bawang merah” mengandaikan suatu pengertian bahwa relasi manusia satu dengan yang lain seperti mengupas bawang merah yang terdiri dari beberapa lapisan. Selama proses interaksi berlangsung, pada dasarnya setiap individu saling mengupas lapisan-lapisan itu (bacaan lanjutan dapat dirujuk pada Blummer, Mead, Goffman dalam Ritzer, 2014).

Dalam memahami konflik, konsep “bawang merah” berupaya untuk mengetahui dan memahami persoalan yang terjadi di aras permukaan. Dan, selanjutnya dikupas untuk dapat mengetahui akar permasalahan sebenarnya. Kepentingan apa yang melatari konflik yang terjadi secara perlahan dikupas hingga sampai pada titik akhir dimana akar konflik dapat diketahui. Pendekatan “garis waktu” adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dinamika konflik dari waktu ke waktu untuk kemudian dipetakan akar konflik, historis konflik, dan kemungkinan penyelesaian.

Secara kasat mata konflik dapat dengan mudah diamati di aras permukaan. Tetapi apa yang tampak, mesti disadari, pada dasarnya merefleksikan sesuatu yang berada di dalam yang sifatnya tersembunyi. Pada konteks ini, gagasan

Galtung mengenai segitiga konflik dapat membantu memahami dan menganalisis kompleksitas konflik utamanya konflik berwajah kekerasan. Konsep segitiga kekerasan yang diajukan Galtung (1990) antara lain kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural.

Segitiga konflik berguna untuk mengetahui gejala, mengidentifikasi berbagai bentuk baik yang terlihat (*direct violence*) maupun yang tidak, dan melihat berbagai kontradiksi antara sikap dan perilaku yang pada kelanjutannya dikategori sebagai bentuk-bentuk konflik. Menariknya pendekatan ini adalah analisisnya yang tajam terhadap aspek struktural dan kultural dimana konflik kekerasan terjadi. Kekerasan itu sendiri, oleh Galtung (dalam Eriyanti, 2017), didefinisikan secara luas sebagai suatu penghalang yang dapat menyebabkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar.

Kekerasan langsung dapat secara kasat mata diamati. Apakah itu pada peristiwa, pelaku maupun korban, serta dampak yang dihasilkan.² Sementara kekerasan struktural tidak dapat secara kasat mata dilihat. Sifat kekerasan struktural tersembunyi di dalam struktur dan bahkan cenderung dinormalisasi secara, meminjam istilah Weber “kerangka besi”, kelembagaan yang kuat. Karena ketersembunyiannya, tidak mudah menjustifikasi secara langsung kepada siapa aktor kekerasan dinisbahkan. Namun pada praktiknya jenis kekerasan ini sangat berbahaya dan secara dramatis dapat melukai kebutuhan dasar manusia, menciptakan ketidaksetaraan akses, struktur politik, ekonomi, dan sumber daya lainnya.

² Kekerasan langsung dapat berupa penggunaan kekuatan fisik maupun nonfisik atau verbal. Penggunaan kekuatan fisik seperti pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual dan lainnya yang melibatkan tindakan fisik. Kekerasan verbal seperti penghinaan, *bullying*, dan lainnya yang menggunakan bahasa verbal untuk mendominasi, menindas, dan menyakiti.

Sedangkan kekerasan kultural adalah merupakan bentuk kekerasan yang melanggengkan secara kulturalif atas kekerasan struktural dan kekerasan langsung (Galtung, 1990). Kekerasan ini ditandai sebagai sikap dipraktikkan dan keyakinan yang diajarkan (diinternalisasi) dalam kehidupan sehari-hari tentang kekuasaan dan keabsahan kekerasan itu dilakukan dan diterima.

Bertolak dari analisis ini, membangun perdamaian pasca-konflik harus memperhatikan tiga aspek kekerasan tersebut dan membangun jalan menciptakan struktur yang berbeda (mentransformasi struktur) dengan masa ketika konflik terjadi. Struktur yang dimaksud, jika tidak menghilangkan setiap benih baru dari warisan konflik struktur yang ada (baca Lambang, 2009) yaitu struktur pemerintahan dan relasi sosial masyarakat yang memungkinkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan negara, masyarakat sipil, dan lembaga pelayanan publik lainnya di aras lokal agar efektif memberikan pelayanan publik mengatasi kerentanan dan hambatan perdamaian.

Pembangunan perdamaian merujuk pendekatan Galtung adalah merupakan proses penyelesaian secara menyeluruh penyebab dasar munculnya konflik kekerasan, membangun dukungan dan memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam upaya mengelola perdamaian masyarakat pasca-konflik secara partisipatif. Pembangunan perdamaian merupakan konsep yang didedah dengan mengedepankan aspek penjagaan dan memelihara suatu proses, pendekatan, dan tahapan yang dibutuhkan untuk mentransformasi konflik ke arah perdamaian (*peaceful*) secara berkelanjutan.

Tabel di bawah mengilustrasikan empat dimensi transformasi konflik menuju pencapaian masyarakat yang damai dan memungkinkan penyelesaian konflik secara konstruktif.

Societal Conflict Transformation

Activities in this area aim to help societies in overcoming their violent past, reduce grievances and enable peaceful conflict resolution. Four dimensions are meant to support such a transformation into a peaceful society

Truth	Justice	Victims	Reconciliation
Revelation of Atrocities	Holding Perpetrators Accountable	Restitution of Harms and Losses	Overcoming societal divisions

Sumber: Fiedler dan Mroß, 2017

Membangun perdamaian masyarakat pasca-konflik harus ditempatkan pada konstelasi konstruksi sosial yang dinamis. Tidak terbatas pada fase terbangunnya kesepakatan bersama antara pihak terlibat. Untuk itu, transformasi konflik *violence to peaceful* melibatkan pendekatan holistik. Termuat di sini adalah hubungan aspek psikologi massa, relasi sosial, agama (spiritual), ekonomi, politik dan budaya dalam upaya mengelola setiap potensi kemungkinan konflik kekerasan sosial baru. Relasi struktural yang adil oleh Galtung (1990) yang menekankan persamaan dan kesetaraan akan mampu mengatasi ketidakpuasan psikologis yang dapat melahirkan konflik sosial baru.

Aspek struktural dalam membangun perdamaian masyarakat pasca-konflik mesti diterjemahkan dengan adanya proses demokratisasi dan desentralisasi (Reychler dan Langer, 2006). Dua hal ini diimbangi dengan pengembangan kelembagaan yang dapat mensinergikan pembangunan perdamaian berkelanjutan dan pembangunan sosial ekonomi.

PEACEKEEPING, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GREEN ECONOMY

Membangun dan menjaga perdamaian (*peacekeeping*) di Indonesia harus melibatkan pengembangan kelembagaan yang bersifat fungsional untuk organisasi dan menyerap berbagai kebutuhan publik. Pengembangan ini bersa-

maan dengan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam arena demokratisasi dan disentralisasi.

Konflik kekerasan mau tidak mau membawa dampak negatif tidak saja kepada aspek psikologis dan sosial masyarakat, tetapi juga kepada aspek ekonomi. Masyarakat yang terjerembab dalam konflik berkepanjangan cenderung mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar khususnya berkaitan dengan ekonomi, terganggu dan terhambatnya proses pembangunan, dan berada dalam instabilitas. Sebagai dampaknya masyarakat berkonflik banyak mengalami trauma psikologis (Mendeloff, 2009; Martz, 2010) dan stress berkepanjangan (Silove, 2014).

Studi ini memberi penekanan membangun masyarakat pasca-konflik melalui agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development and empowerment*). Agenda pembangunan berkelanjutan mengandaikan adanya interkoneksi secara berimbang berbagai aspek kehidupan untuk memanusiakan manusia dan peka terhadap lingkungan secara berkelanjutan.

Aspek memanusiakan manusia itu secara komprehensif termuat sebagaimana diketengahkan Bank Dunia (2015) yaitu pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem; mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS dan penyakit lainnya; memastikan kelestarian lingkungan; perdamaian dan kesejahteraan.

Belajar dari negara maju, menunjukkan korelasi antara tingkat konflik kekerasan dengan kesejahteraan suatu negara (Global Peace Index, 2020). Semakin tinggi tingkat kesejahteraan negara maka kekerasan sosial semakin rendah.

Bagi Indonesia yang masih berada dalam proses pembangunan, masalah kesejahteraan merupakan topik utama yang sangat penting diperhatikan. Berkaca

kepada daerah rentan konflik masa lalu, daerah-daerah ini adalah merupakan daerah dengan menghadapi persoalan ekonomi yang serius. Sehingga dominan, gairah kekerasan memiliki relasi adanya masalah ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya. Demikian pula Papua yang saat ini masih dalam mencari jalan perdamaian. Tingkat kemiskinan di Papua sangat tinggi (Kompas, 2020) dan bahkan data mutakhir (BkKBN, 2019) tercatat sebagai yang berada dalam angka prevalensi stunting nasional.

Konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri mengalami transformasi seturut dengan perkembangan masyarakat global dan tantangan yang dihadapinya. Orientasi pembangunan tidak lagi semata “mengeruk ekonomi”, tetapi pemanfaatan dengan memperhatikan masalah lingkungan dan ekosistem yang menunjang nilai kemanusiaan untuk masa kini dan masa depan. Pada dataran ini, konsep “green economy” layak diajukan baik sebagai cerna akademis maupun pemegang kekuasaan. Gagasan “green economy” (lihat Bina, 2013) berorientasi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan berorientasi pada aspek yang ramah lingkungan dan ekosistem.

Terdapat dua hal yang ingin dicapai dalam gagasan *green economy* (Bappenas, 2012). Pertama, ekonomi hijau mengajukan konsep ekonomi yang mempertimbangkan makro ekonomi dan bagaimana kontribusinya terhadap produksi barang, jasa dan serta pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ramah lingkungan (*green investment and green jobs*) sehingga demikian eksploitasi alam dan manusia dapat dihindari. Kedua, *green economy* mengajukan *propoor green investment* yang dapat menjadi daya dorong pengentasan kemiskinan dan membangun kesetaraan. Perspektif instrumental dari konsep ini mengandaikan perubahan perekonomian dan struktur fundamental yang menjadi daya dorong pelaku ekonomi, berbagai institusi, dan masyarakat luas mendapatkan kemanfaatan

berbasis ramah lingkungan. Bukan berbasis pada eksploitasi. Melalui pendekatan ini, *peacekeeping, sustainable development and green economy* sangat dimungkinkan terjadinya proses membangun masyarakat pasca-konflik ke arah perdamaian, demokrasi, dan nirkekerasan sosial.

KESIMPULAN

Masyarakat pasca-konflik mendapat perhatian khusus dalam studi ilmu sosial karena kehadiran fenomena kekerasan baru yang secara bersamaan dapat merambah ke berbagai aksi premanisme dan keterlibatan orang-orang yang tidak bersalah (Hayner, 2010; Hynes, 2004). Tidak sampai di situ, masyarakat pasca-konflik juga berdampak secara sosial, ekonomi, dan bahkan secara psikologis seperti trauma.

Terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan dalam masyarakat pasca-konflik yaitu kondisi dan potensi ekonomi, sistem politik, dan kapasitas birokrasi (kelembagaan). Berbagai kebijakan pasca-konflik pada kaitannya dengan tiga hal tersebut harus berorientasi pada proses mewujudkan rekonstruksi, mendorong pemulihan berkelanjutan, dan mereduksi kemungkinan kembali terulangnya konflik dan kekerasan sosial baru.

Pada masa pasca-konflik Indonesia bermetamorfosa kepada wajah baru dalam tata kehidupan sesama dan kehidupan bernegara. Wajah konflik dan kekerasan sosial di Indonesia pada masa pasca-konflik berkarakter pada konflik demokrasi elektoral. Pola penyaluran konflik cenderung bertransformasi ke cara-cara yang damai (*peaceful*) seperti dalam bentuk aksi protes dan demonstrasi meskipun pada titik tertentu konflik kekerasan tetap terjadi.

Artinya, pasca-konflik di Indonesia tidaklah berarti bahwa konflik dan kekerasan sosial masyarakat turut berakhir secara totalitas. Akan tetapi masyarakat Indonesia tetap berada dalam gesekan-gesekan baik itu antara rezim penguasa

maupun sesama kelompok masyarakat yang bersifat komunal. Studi ini menekankan pembangunan masyarakat pasca-konflik melalui proses pembangunan berkelanjutan (*sustainable development and empowerment*) yang mengandaikan adanya interkoneksi berimbang secara berkelanjutan antara berbagai aspek kehidupan dalam tujuannya untuk memanusiaikan manusia, peka terhadap lingkungan, dan mengantisipasi sejak dini kemungkinan konflik kekerasan yang akan terjadi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alexander, J., Eyerman, R., Giesen, B., Smelser, N. & Sztompka, P. (2004). *Cultural Trauma and Collective Identity*. Berkeley: University of California Press.
- Ali-Fauzi, I., Alam, R. H., & Panggabean, S. R. (2009). *Pola-pola konflik keagamaan di Indonesia, 1990-2008*.
- Anan, Kofi. (2002). *Prevention of Armed Conflict: Report of the Secretary General*. New York: United Nation.
- Ansori, Muhammad Hasan., Putra, R. Praditya Andika., Efendi, Johari,... Hutagalung, Vidya. (2015). *Post-Conflict Democracy, Violence, and Peace-Building in Aceh and Maluku*. Jakarta: The Habibie Center, National Violence Monitoring System (SNPK)
- Arjon, Sugit. 2018. Conflict Management in Indonesia: Policy Perspective and Analysis. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanitirs*, 8(1), 2-9.
- Arnani, Mela. (2020). Angka Kemiskinan Indonesia Naik, Ini Data Per Provinsi. Diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all>
- Asia Report. (2007). *Aceh: Komplikasi Paska Konflik*.
- Aspinall, E., & Berger, M. T. (2001). The break-up of Indonesia? Nationalisms after Decolonisation and the Limits of the Nation-state in Post-cold war Southeast Asia.
- Barron, P., Jaffrey, S., & Varshney, A. (2014). *How Large Conflicts Subside: Evidence from Indonesia* *How Large Conflicts Subside: Evidence from Indonesia* (Indonesian). The World Bank.
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Bina, Olivia. (2013). The green economy and sustainable development: an uneasy balance? *Environment and Planning. Government and Policy*, 31, 1023–1047.
- BkkBN. (2019). Bkkbn Siapkan Rp1,3 Miliar Untuk Cegah Stunting di Papua. Diakses pada <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-siapkan-rp1-3-miliar-untuk-cegah-stunting-di-papua>
- Brown, Graham., Langer, Arnim & Stewar, Frances. (2011). *A Typology of Post-Conflict Environments. Centre for Research On Peace and Development (CRPD) Working Paper, 1*.
- Darby, J. (2001) *The Effects of Violence on Peace Processes*. Washington DC: United States Institute of Peace Press.
- Ericksson, M. & Wallenstein, P. (2004). *Armed Conflict, 1989-2003. Journal of Peace Research*, 41, 625-36.
- Fahmi, C. (2014). *Jejak Konflik Baru di Aceh: Pemetaan Jenis & Sumber Konflik Politik, Hukum, Sumber Daya Alam, Agama, Etnis dan Ekonomi*. Kesbangpol dan Linmas Provinsi Aceh.
- Fiedler, Charlotte & Mroß, Karina. (2017). *Post-Conflict Societies: Chances for Peace and Types of International Support. Briefing Paper, 4*.
- Galtung, Johan. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.
- Galtung, Johan. (1996). *Peace by Peaceful*

- Means, Peace and Conflict, Development and Civilization.* London: PRIO, SAGE Publications.
- Global Peace Index. (2020). Diakses pada <http://statisticstimes.com/ranking/global-peace-index.php>.
- Hayner, P. (2010) *Unspeakable Truths*. 2nd Edition. Cambridge: Polity Press.
- Hynes, H.P. (2004). On the Battlefield of Women's Bodies. *Women's Studies International Forum*, 27, 431-45.
- Jubba, Hasse. (2019). *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Klinken, Gerry van. (2007). *Communal Violence and Democratization in Indonesia Small town wars*. London and New York. Routledge Taylor & Francis Group.
- Lambang, Trijono. (2009). Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 48-70
- Martz E. (2010). "Introduction to Trauma Rehabilitation After War and Conflict". In: Martz E. (eds) *Trauma Rehabilitation After War and Conflict*. New York: Springer https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5722-1_1.
- McLaughlin, Karrie & Perdana, Ari. (2010). Conflict and Dispute Resolution in Indonesia: Information from the 2006 Governance and Decentralization Survey. *Indonesian Social Development Paper*, (16) 01.
- Meghan, O'Sullivan., et al.. (2001). Sri Lanka: Civil Strife, Civil Society, and the State 1983-1995. *War and Underdevelopment*, 2, 176-219.
- Mendeloff, David. (2009). Trauma and Vengeance: Assessing the Psychological and Emotional Effects of Post-Conflict Justice. *Human Rights Quarterly*, 31(3), 592-623.
- Mittal, D., & Ranjan, A. (2016). India-Pakistan: Contours of Relationship. *Space and Culture, India*, 4(1), 6-18. <https://doi.org/10.20896/saci.v4i1.192>
- Muliono. (2020). Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Konflik Sosial di Indonesia. *Al-Adyan, Journal of Religious Studies*, 1(2), 116-132.
- MSR/Multi-Stakeholder Review of Post-Conflict Programming in Aceh: Identifying the Foundations for Sustainable Peace and Development in Aceh. (2009).
- Purdey, J. (2006). *Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996-199*. Singapore University Press.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenada Media Group.
- Silove, Derrick., Liddell, Belinda., Rees, Susan., Chey, Tien., ...et al. (2014). Effects of recurrent violence on post-traumatic stress disorder and severe distress in conflict-affected Timor-Leste: a 6-year longitudinal study. *The Lancet Global Health*, (2)5, 293-300.
- National violence monitoring system dataset/SNPK*. (2015).
- World Bank. (2010). *Pola-pola Baru Kekerasan di Indonesia: Data Awal dari Enam Provinsi dengan Pengalaman Berskala Tinggi*.
- YLBHI. (2020). *Reformasi Dikorupsi Oligarki. Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019*.